

**PELAYANAN PUBLIK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN MELALUI PUSAT KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PUSKESOS)
(Studi di Kelurahan Purwantoro Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



**Oleh:
ANTONIUS SUKIMAN
NIM. 2016210026**

**KOMPETENSI MANAJEMEN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2020**

RINGKASAN

Abstrak: Kemiskinan pada urgensinya mendapatkan suatu perhatian dalam penanganan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini pemerintah kelurahan mengupayakan penanggulangan kemiskinan melalui lembaga masyarakat dengan tujuan pelayanan publik dalam upaya penanggulangan kemiskinan, terdapat pada pelayanan pusat kesejahteraan sosial yang menjadi upaya dalam penanganan kemiskinan. Proteksi sosial tersebut tertuang pada Peraturan Presiden tentang percepatan penanggulangan kemiskinan No. 15 Tahun 2010, serta berdasarkan pelayannya tertuang pada Undang-Undang pelayanan publik No. 25 Tahun 2009.

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data wawancara, dokumentasi, observasi, dengan teknik penentuan informan *purposive sampling*. Keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dengan melakukan pengecekan data yang didapatkan. Analisa data penelitian menggunakan model analisis Sugiyono yang terdiri atas *Data Reduction, Data Display, Data Collection*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik melalui pusat kesejahteraan sosial berlokasi di pemerintahan Kelurahan Purwantoro dalam upaya pelayanan administratif, barang, dan jasa meliputi fasilitas bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin hal ini berpandangan pada kesejahteraan masyarakat dengan memahami fenomena yang terjadi. Berdasarkan pengelompokan masyarakat yang dilakukan untuk memfasilitasi pelayanan puskesmas meliputi KIS, PKH, Lansia, RLTH, RASDA, BPNT, jumlah penerima pelayanan bagi masyarakat miskin 1.063 jiwa ditemukannya data bahwa masyarakat miskin masih dalam jumlah besar.

Kata Kunci : Pelayanan Puskesmas, Kemiskinan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang urgen dan merupakan masalah yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan berwujud pada panduan pembentukan SLRT dan Puskesos Dirjen pemberdayaan sosial dengan peyenggaraan pelayanan secara utuh diberikan kepada masyarakat berkebutuhan, mempersiapkan kebutuhan masyarakat dengan usulan-usulan secara efektif dalam penyaluran, mekanisme sebagai upaya masyarakat untuk mendapatkan Id-BDT sebagai masyarakat miskin, memberikan informasi secara akurat terhadap bantuan sosial yang menjadi usulan-usulan, prosedur pelayanan dan prosedur dalam pendaftaran terhadap masyarakat, serta fasilitas bantuan yang akan disalurkan.

Menurut PerPres tentang Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan No. 15 Tahun 2010, upaya peraturan ini merupakan suatu akses pelaksanaan pelayanan sosial dan monitoring teknik pelaksanaan penanggulangan kemiskinan bagi kesejahteraan sosial, hal ini yang berpandangan bagi pemerintah untuk meminimalkan buruknya rahabilitas proteksi sosial. Fenomena ini dipandang sebagai masalah terutama dengan semakin banyaknya permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan. Modernisasi sering kali dituding sebagai objek masalah, perkembangan daerah secara pesat mengundang terjadinya urbanisasi secara langsung terhadap daerah kumuh yang identik dengan kemiskinan.

Proses penanggulangan kemiskinan ini berdampak pada keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pelayanan diatur dalam Undang-Undang penyelenggaraan kesejahteraan sosial Nomor 11 Tahun 2009. Menurut undang-undang tersebut, penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah kepada suatu objek yang akan terjadinya proses kegiatan, dengan terpadunya sistem tata laksana, masyarakat dan pemerintah daerah menjadi keseimbangan penyelenggaraan pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi jaminan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial. Pelayanan sosial dalam arti luas merupakan pelaksanaan kegiatan yang mencakup kearah pengembangan, terlihat pada pelayanan kesejahteraan sosial dalam bidang ekonomi, kesehatan, keluarga miskin, cacat, pendidikan, dan tunasosial. Terciptanya pelayanan sosial berbasis penanggulangan kemiskinan menjadi proteksi utama bagi pemerintah.

Perkembangan di Kota Malang mengalami kemajuan, mulai dari bidang ekonomi, transportasi, kesehatan hingga pendidikan, kemajuan dan perkembangan dari Kota Malang dapat kita ketahui melalui pendapatan perkapita yang mencapai Rp1,9 Triliyun pada tahun 2018. Meskipun pertumbuhan pendapatan per kapita Kota Malang di atas rata-rata nasional pada tahun 2018 masih terukur bahwa ketidakmampuan mengurangi angka kemiskinan. Faktanya, menurut Basis Data Terpadu (BDT) kelurahan Purwantoro pada Tahun 2019 Semester I jumlah warga miskin (gakin) Sebanyak 1.063 jiwa oleh karna kebutuhan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berjangka.

Salah satu program pemerintah yang sedang berkembang secara tepat dan terus disempurnakan mengenai kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan basis data terpadu adalah Pusat Kesejahteraan Sosial. Program ini menjadi salah satu motor penggerak terciptanya kemandirian pemerintah daerah serta masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan secara berkala melalui Puskesmas, berdasarkan BDT dapat memperbaiki penghasilan berhubungan dengan jaminan dan bantuan finansial, seperti KIS, BSP, RLTH, PKH, KIP. dan bantuan bagi keluarga-keluarga miskin, penyediaan seperti itu bertujuan untuk memberikan perlindungan ekonomi serta memelihara standar hidup minimal.

Permasalahan mengenai pelayanan kesejahteraan sosial masih menjadi tantangan Pemerintah Kelurahan yang nantinya diharapkan mampu menghasilkan *Problem Solving* dalam hal pelayanan sosial, menurut Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009, mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang baik. Pelaksanaan Pelayanan publik juga tidak akan terlepas dari aktifnya monitoring penanggulangan kemiskinan. Baik pemerintah maupun masyarakat, secara utuh memiliki keseimbangan berlangsungnya proses pelayanan, persiapan, mekanisme, informasi, prosedur serta fasilitas guna mewujudkan penanggulangan kemiskinan dengan tujuan menjadikan pemerintahan yang baik. Berdasarkan latar Belakang diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti terkait pelayanan Puskesmas yang berjudul “Pelayanan Publik Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat kesejahteraan sosial (Studi di Kelurahan Purwantoro Kota Malang)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti menuraikan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelayanan Publik Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat kesejahteraan sosial Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Pelayanan Publik Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat kesejahteraan sosial Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelayanan Publik Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat kesejahteraan sosial di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor pendukung dan penghambat Pelayanan Publik Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat kesejahteraan sosial.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Akademis

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik dalam bidang pelayanan publik, sebagai bahan acuan atau

referensi guna menambah dan memperkaya kajian tentang Pelayanan Publik Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Puskesmas.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi, hasil penelitian dapat diharapkan menjadi masukan dalam pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan sosial.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pelayanan kesejahteraan sosial dalam penanggulangan kemiskinan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya serta menjadi bahan pertimbangan, masukan dan tambahan bagi peneliti yang akan meneliti masalah serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bhinadi, Ardito. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV. BUDI UTAMA
- Fahrudin, Adi. 2018. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. REFIKA ADITAMA
- Firdianti. 2018. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV. GRE PUBLISHING
- Hasibuan, S.P Malayu. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. BUMI AKSARA
- Heene, Aime, dkk. 2015. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung: PT. REFIKA ADITAMA
- Mukarom, Zaenal & Laksana, Wijaya M. 2018. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jawa Barat: CV. PUSTAKA SETIA
- Notowidagdo, Rohiman. 2016. *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*. Jakarta: AMZAH.
- Rohman, Abd, 2018. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: CV. CITA In-TRANS PUBLISHING
- Semil, Nurmah. 2018. *Pelayanan Prima Instansi Pemerintah*. Depok: PRENADA GROUP
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Suyoto, Bagong. 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Starategi Penanganan*. Malang: In-Trans Publishing
- Tersiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: STRAR UP
- Winarto, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: PT. BUKU SERU

Undang-Undang / Peraturan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Kemenpan No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Jurnal Online

Nuraida, N., Rusli, B., Sintaningrum, S., & Rahmatunnisa, M. (2019). Evaluasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Subang. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 8(1), 38-47.

Sulhan, M., & Sasongko, T. (2017). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Kertu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar pada Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Kauman Kota Malang). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(1).

Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa*, 3(3).

Panduan

Panduan Pembentukan SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu). Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat. 2017.